Membaca Pesan *Lemah Tanjung* Karya Ratna Indraswari Ibrahim dari Perspektif *Postcolonial Ecocriticism*

Winda Candra Hantari
Universitas Tidar
windacandra@gmail.com

Abstract

Alas! A space, in this case the urban forest, primary considered as public domain which presence is potentially significant as the established-natural-ecology is read but a subject, or valuable entity by investors who want to take over the site to be used as a commercial enterprise promoting economic benefits. The former even tend to deny the historical values and issues on earth-conservation. The complexity of the struggle to win the dispute between the investors, brings the notion of the anthropocentric agenda with local inhabitants over an area which is home to scarce vegetation and indigenous animals, as well as water spring at the heart of Malang City becomes the main awareness excavated by Ratna Indraswari Ibrahim through her work, *Lemah Tanjung*. Through the perspective of Postcolonial Ecocriticism, the particular point presented in this paper is how Ecological Imperialism is narrated and presented in the novel? The discussion found several indications that Lemah Tanjung, the name of the disputed-place is attributed to and positioned as an *alien* or *other* which should not be maintained. It is exploited due to the 'development' by investors, teamed-up with the bureaucrat. The struggle to liberate Lemah Tanjung from the conflict of interest seems to be long and windy since there are unequal power relation due to lack of support from fellow dwellers around the forest thanks to the terrors conducted by the powerful.
Keywords: *Postcolonial Ecocriticism*, *ecological imperialism*, Lemah Tanjung, teror, relasi kuasa

1. PENDAHULUAN

Modernisasi yang menjadi semangat perkembangan peradaban manusia yang memasukkan unsur pembangunan terutama yang melibatkan alih fungsi lahan, atau penggunaan sumber daya alam yang masif sejatinya telah melanggengkan kolonisasi baru dan imperialisasi yang dilakukan pihak yang diyakini memiliki modal kapital dan kekuasaan. Hal ini telah membawa banyak dampak yang merugikan bumi dan seisinya, baik manusia maupun makhluk hidup lain yang harus menanggung dampak secara nyata diantaranya polusi udara dan air yang lewat ambang batas, perubahan iklim secara global, rusaknya ekosistem, serta musnahnya ratusan ribu spesies langka baik hewan maupun tumbuhan.

Utamanya kecenderungan hal ini terjadi di wilayah yang dalam pembahasan ruang lingkup poskolonial direferensikan sebagai dunia ketiga. Terlepas dari kompleksitas permasalahan politik yang memberikan tantangan bagi para demonstran di jalanan yang menantang kesewenangan kekuasaan di wilayah tersebut, berbagai pesan perjuangan termaktub dalam karya sastra kontemporer karya para penulis yang berusaha merekam, seringkali bahkan turut melancarkan kritik bagi para penguasa. Fenomena ini seperti yang disampaikan oleh Han-Georg Erney (2006:3) dalam *Modernity and Globalization in Contemporary Literature: A Postcolonial-Ecocritical Approach*, bahwa

> Most of which happen to be former colonies, it should not come as surprise that it is in contemporary postcolonial literature that these effects find some of their most interesting reflection…their characters cope with the destruction of the environment.

Tentu saja permasalahan imperialisme ekologis yang coba untuk dipotret, diramu dan disampaikan lewat teks sastra ini akan menjadi wilayah yang terlalu menarik untuk tidak dibahas dan dilewatkan. Kejelian penulis yang menyisipkan agenda kritik dan perjuangan yang ditiupkan pada karakter yang dilakonkan narasi yang disusunnya adalah peneguhan kajian sastra yang bersifat memberi *'pencerahan'* terus menerus dengan harapan pembaca akan memiliki kesadaran bahwa ekosistem alam perlu dijaga dari penjarah yang mengatasnamakan agen pembangunan.

Namun demikian usaha pencerahan ini tidak selalu berhasil karena pembaca sering *gagal paham* terhadap permasalahan yang coba ditelaah oleh karya sastra tersebut karena *literary device* yang seringkali tidak menyentuh level pemahaman lanjutan pembaca. Hal ini menjadi the *ultimate concern,* atau konsentrasi utama bagi penulis paper dalam usaha menjembatani pembacaan sebuah karya dengan perspektif yang kritis yang melihat hubungan sangat erat antara relasi kuasa, yang lebih sering menjadi ranah bahasan yang manusiawi dengan alam yang lebih sering diatributkan sebagai objek yang liyan daripada subjek. Erney menambahkan bahwa *the concern on ecocritic and postcolonial theorist are crucially interrelated, and that in combining the unique strengths of these two fields, we can open the way to a rich new critical perspective* (Erney, 2006: 2). Pada titik ini Postcolonial Ecocriticism menjadi pisau yang sangat tajam untuk mengakomodasi konsentrasi penulis.

2. ISI

2.1 Kerangka Teori

Rosyidah (2013), merujuk pada bahasan yang dilontarkan oleh Marzek tentang "*Crusoe Syndrom*" yang mendefinisikan perasaan para pendatang Eropa di awal penjejakan kakinya di negeri baru, menyebut bahwa para pendatang, untuk menyebut subjek manusia yang tidak berasal dari daerah yang menjadi fokus bahasan dalam novel sebenarnya mengalami perasaan teralienasi karena menghadapi situasi baru yang jauh berbeda dengan budaya yang telah lama mereka miliki di tempat asalnya. Kecenderungan ini sejalan dengan rumusan '*old culture meeting new environment' arising from nature's "unassimilability to the structures – social and linguistic – of colonial culture"* (Hartmann, 2006: 90) yang menjadi pengalaman awal kolonialisme.

Asal muasal kolonisasi muncul karena usaha pendatang dalam meminimalkan teror menjadi *liyan* yang mereka dapatkan dari bersentuhan dengan alam baru, atau *"the terror of inhabiting an other space as other" (Rosyidah, 2013:3)* Dengan demikian daerah 'jajahan' harus ditransformasikan sesuai dengan kebutuhan para pendatang. Transformasi diinisiasi dengan penaklukan wilayah (colonization) atau pendomestifikasi tanah-tanah dan penduduk asli sehingga aturan main yang berlaku di wilayah tersebut adalah aturan pendatang (colonizer). Proses kolonisasi yang dimaksud seringkali melibatkan pemimpin atau *raja kecil* yang merupakan bagian dari penduduk asli yang memiliki kepentingan di arus kekuasaan baru untuk kepentingan pribadi.

Kolonisasi memungkinkan pertemuan dua kutub yang berseberangan yaitu *colonizer* yang dalam istilah *ecocriticism* bersifat antroposentris, yaitu memiliki persepsi individual terhadap alam, menempatkan manusia sebagai pusat dan memiliki pandangan bahwa alam sekitar harus dimanfaatkan demi kepentingan manusia, dengan penduduk asli yang memiliki perspektif yang lebih komunal dan ekosentris serta menyadari sepenuhnya bahwa alam memiliki daur atau siklus dan keterbatasan sehingga alam dihormati dan diperlakukan sebagai *partner* kehidupan.

Pun ketika proklamasi negeri-negeri jajahan itu terjadi tidak serta merta relasi kuasa ini mandeg. Bentuk baru muncul sebagai kelanjutan dari kolonisasi yang pada awalnya menghadirkan pelaku (colonizer) di tanah jajahan. Huggan menyatakan formulasinya *that it was impossible to analyze modern imperialism and colonialism*

without engaging with the massive scale of environmental devastation that they entail (Huggan & Tiffin, 2010: 39) Nyatanya kolonisasi muncul dengan wajah baru yaitu imperialisme yang mengutamakan kepentingan politik kapitalisme dan ekonomi dengan kerusakan lingkungan hidup sebagai manifestasi penjajahannya. Transformasi wilayah menjadi kota dengan sifat yang dan tata ruang yang lebih cenderung mengakomodasi kepentingan manusia semata menjadi perdebatan yang menarik apabila dikaitkan dengan isu poskolonial dan ekokritik, *tensions remain between discourses of nature, wilderness and preservation and discourses of urbanism and environmental justice that still need to be addressed* (White, 2009: 187)

Ibrahim (2003) merangkum permasalahan yang timbul berkenaan dengan perjuangan mempertahankan tanah tempat tumbuhnya pepohonan langka, rumah bagi hewan lokal yang mulai langka serta sumber mata air yang krusial bagi keseimbangan alam utamanya di Kota Malang ketika berhadapan dengan penguasa yang direpresentasikan oleh developer yang hendak mengalihfungsikan wilayah tersebut menjadi perumahan mewah dan menawarkan tukar guling tanah berharga tersebut dengan lokasi lain di luar kota. Usaha Mbak Gita dalam mendukung perjuangan Ibu Indri, warga sekitar yang getol mempertahankan tanah hutan yang juga satu areal dengan Akademi Penyuluh Pertanian selain 'bermusuhan' dengan raksasa penguasa tanah juga mengalami banyak tantangan baik dari dirinya sendiri yang ternyata jatuh cinta pada Roy, mafia developer yang merupakan bagian dari 'musuh' bersama maupun tantangan dari karakter lain. Diantaranya adalah Paul laki-laki keturunan Tionghoa suaminya yang bermukim di Australia karena menyelamatkan diri dari trauma kerusuhan 1998. Paul selalu mengingatkan Mbak Gita untuk segera meninggalkan Kota Malang karena tidak aman lagi, Bonet anak gadis semata wayangnya berusia 11 tahun yang gemar menantikan kunang-kunang di hutan sumber mata air tersebut namun memiliki kerinduan dan menginginkan Mamanya lekas bersatu dengan Papanya, Mbak Syarifah yang melalui misi penelusuran mengantarkan Mbak Gita pada perkenalannya dengan Roy, serta pejuang lain dalam forum penolakan ruilslag yang pada puncak konflik menganggap Mbak Gita sebagai lawan daripada kawan.

Teori Postcolonial Ecocriticism yang membedah kompleksitas permasalahan lingkungan yang terkait dengan masalah relasi kuasa yang dikembangkan dalam novel diaplikasikan dalam mengkaji novel ini. *If the injustice of our world are undeniably interconnected and complex, however invisible such connections may seem, our*

solutions need also to be interconnected meneguhkan asumsi dasar Postcolonial Ecocriticism yang dikemukakan Mukherjee (2010:39) bahwa *all colonial and imperial issues were, by their very nature, also environmental issue.*

Di titik ini aspek ekologi menjadi sangat penting dalam penjajahan. Sebagai makhluk *biohostorical*, atau yang mampu mengkonstruksi sejarah atau peradabannya manusia tidak mungkin menarik dirinya, atau memberi jarak dari habitat dimana dia berpijak, dengan tidak meninggalkan jejak apapun di alam. Dengan demikian Pernyataan Mukherjee (Huggan & Tiffin, 2010:2) menjadi sangat logis.

> Surely, any field purporting to theorise the global conditions of colonialism and imperialism (let us call it postcolonial studies) cannot but consider the complex interplay of environmental categories such as water, land, energy, habitat, migration with political or cultural categoris such as state, society, conflict, literature, theatre, visual arts. Equally, any field purporting to attach interpretative importance to environment (let us call it eco/environmental studies) must be able to trace the social, historical and material co-ordinates of categories such as forests, rivers, bio-regions and species.

Ecocriticism, dengan diskusi yang memunculkan oposisi biner seperti pada bahasan poskolonial"self-other" adalah teori yang sedang menjadi pembahasan hangat pada diskusi dunia sastra terkini. Dengan memfokuskan diri pada fenomena seputar relasi Nature-Culture yang dilihat dari kacamata antroposentris-ekosentris, ecocriticism meyakini bahwa kerusakan ekologis terjadi sebagai akibat dari kecenderungan antoposentris manusia. Dalam kaitannya dengan pembahasan ranah poskolonial *Ecological Imperialism* yang diketengahkan di paper ini adalah hasil dari perbuatan manusia yang sangat antroposentris, yang 'kebetulan' memiliki *power* atau kuasa yang lebih. Huggan dan Tiffin membagi ecological imperialism menjadi tiga bentuk, yakni:

1. ...dualistic thinking that continues to structure human attitudes to the environment to the masculinist, 'reason-centered culture' that once helped secure and sustain European imperial dominance, but now proves ruinous in the face of mass extinction and the fast-approaching 'biophysical limits of the planet' (Huggan & Tiffin, 2010: 3)
2. Biocolonisation, ... the broadly biopolitical implications of current western technological experiments and trends (Huggan & Tiffin, 2010: 3)
3. Environmental racism, as 'the connection, in theory and practice, of race and the environment so that the oppression of one is connected to, and supported by, the oppression of the other' (Huggan & Tiffin, 2010: 4)

Pada praktiknya ketiga bentuk *ecological imperialism* tersebut disamarkan dan

dijustifikasi atas nama pembangunan yang nyatanya adalah bentuk baru dari kolonisasi. Selain teror yang masif serta terstruktur, untuk mempertahankan posisi dan kuasa, para penjajah menyuarakan jargon sustainable development yang diartikan sebagai "*the resignification of nature as environment; (as) a reinscription of the Earth into capital via science; (as) the reinterpretation of poverty as (an) effect of destroyed environment; (and as) the new lease on management and planning as arbiters between people and nature*" (Huggan & Tiffin, 2010: 32).

3. DISKUSI

Di Novel Lemah Tanjung, narasi yang memuat ketiga klasifikasi *ecological imperialism* yang diketengahkan diatas dibuka dengan penggambaran usaha seorang Mbak Gita yang penasaran apakah di Kota Malang, di tengah deru pembangunan fisik tempatnya tinggal, kunang-kunang masih dapat ditemukan. Ternyata dalam pencariannya dia bertemu dengan Ilham yang merupakan salah satu pemuda yang tinggal di rumah pegiat lingkungan yaitu Ibu Indri. Ilham kemudian mengantarkan Mbak Gita dan Bonet untuk mengagumi kunang-kunang di hutan dekat areal APP, " ada kunang-kunang, berarti di sini masih ada air jernih yang belum dikotori oleh limbah apapun" (Ibrahim, 2003:5). Tujuannya semula hanya ingin menunjukkan pada Bonet bahwa ada makhluk bersayap yang menyala serupa lentera. Namun demikian rasa penasaran tersebut ditimpali dengan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata terjadi sengketa yang pelik antara pemodal dengan warga sekitar serta pegiat lingkungan atas tanah tersebut. Menolak direlokasi adalah satu bentuk perlawanan yang dilancarkan oleh kelompok penolak ruilslag.

3.1 *Otherness.* Menganggap Alam sebagai *liyan*

Sengketa yang terjadi antara pemodal dengan pihak yang mendukung keberadaan wilayah konservasi adalah akibat dari cara pandang antroposentris dari para investor terhadap alam. Sebagai *alien* atau *other* alias liyan, alam, yang dapat dijamah lewat penguasaan atas lahan merupakan sumber produksi utama untuk kepentingan finansial kapitalis. Seperti yang diserukan oleh Dokter Asrul salah satu dari pihak yang meruilslag Lemah Tanjung ketika gusar karena bank yang tak lagi hendak mengucurkan dana sedikit mengganjal usahanya, "Apa mereka tidak pernah berpikir, berapa karyawan yang harus saya hidupi bersama keluarganya?" (Ibrahim, 2003: 220). Selain masalah kucuran dana Dokter Asrul juga tidak habis pikir pada sikap media yang ditengarai memojokkan posisinya sebagai pelaku bisnis yang

memiliki ‘niat yang baik’ untuk menyelamatkan kehidupan pegawai-yang diatributi sebagai rakyat banyak-nya.

> Ini merepotkan orang bisnis seperti kami. Setiap langah bisnis kita sekarang ditafsirkan lain. Jangan lupa, kami membuka lapangan kerja untuk rakyat banyak. Bukan seperti mereka yang bisanya ngomong saja… mereka yang akan kasih makan karyawan saya? (221)

Kutipan tersebut meneguhkan jargon *development* yang menjadi bahasan *postcolonial ecocriticism*. Keterbatasan wilayah kota saat ini yang tidak mampu menampung pembangunan yang mengedepankan aspek fisik mengakibatkan ekspansi wilayah gigir kota atau *outskirt* tempat tumbuhnya hutan yang merupakan sumber plasma nutfah tampak menarik dan bernilai ekonomis yang tinggi bagi para developer, sehingga dengan menyaru pada alasan pengembangan wilayah, lokasi ini disasar untuk dibangun. *Development* adalah usaha terbaru dari para penjajah untuk “colonize the last areas of Third World social life that are not yet completely ruled by the logic of the individual and the market such as water rights, forests, and sacred groves” (Marzek, 2007: 32)

Tanah sebagai areal kontestasi kekuasaan dijustifikasi oleh para developer atau pemodal demi pembangunan dan kemakmuran finansial manusia lewat alih fungsi lahan sehingga memiliki nilai yang -dalam pola pandang antroposentris-ekonomis. Hutan yang memiliki kekayaan non-uang tampak sebagai objek. Yaitu *uncultivated land* yang bisa dimanfaatkan *into a utility for the market.* Sebaliknya, warga sekitar yang tersisa dan pegiat lingkungan di bawah pimpinan Ibu Indri meyakini bahwa alam seharusnya dihormati sebagai subjek.

> …Oleh karena itu, saya merasa juga harus tetap di sini, mempertahankan tanah ini, daerah serapan air dan penuh burung-burung dari 28 spesies dan berjenis-jenis tanaman langka. Keserakahan itulah yang ingin kami gulingkan… (Ibrahim, 2003: 4)

Pihak yang ‘dijajah’ atau memiliki kuasa yang lebih sedikit daripada developer dalam konteks oposisi biner poskolonial ini meyakini bahwa usaha untuk membatalkan ruilsslag yang dilakukan mereka sangat logis dan demi kepentingan orang banyak. Dalam perspektif yang mereka yakini, usaha pembangunan yang

digalakkan oleh developer tersebut tidak menempatkan alam sebagai entitas yang perlu 'diajak berdialog' serta dipertimbangkan keberadaannya namun malah cenderung dicaplok demi keserakahan ekonomis yang tidak berwawasan lingkungan.

> …bukan saja punya air yang jernih, melainkan ada sumber mata air. Kalau sampai ditutup beton, akan membuat kota Malang banjir. Lebih dari itu, di areal ini terletak kampus APP, tempat anak-anak muda Indonesia yang paling berbakat dididik sebagai penyuluh-penyuluh pertanian yang tangguh. Bayangkan, begitu berharganya tanah di sini, kok akan diruilslag buat kepentingan segelintir orang kaya. (Ibrahim, 2003: 5-6)

Ideologi rasis kolonialisme menganggap "indigenious cultures as "primitive", less rational, and closer to children, animals, and nature" (Huggan & Tiffin, 2010:5) adalah justifikasi eksploitasi terhadap "animal and (animalized human) 'others' in the name of a 'human-and reason centered culture that is at least a couple of millennia old'"

Dalam hal ini yang dianggap liyan tidak hanya alam namun juga warga sekitar dan para pegiat lingkungan yang peduli akan keberlangsungan ekosistem alam dan berusaha menyelami peran alam dalam keseimbangan jagat raya. Dalam proses memanfaatkan alam sebagai sumber kepentingan finansial ekonomis, para developer cenderung menafikan peran pribumi, dalam novel ini adalah masyarakat sekitar yang sudah bertahun-tahun berada di daerah itu yang merawat dan memahami hutan tersebut, bahkan keberadaan masyarakat ini dianggap sebagai batu ganjalan pembangunan yang hendak dilakukan oleh developer.

3.2 Biocolonization

Klasifikasi kedua dalam pendefinisian Imperialisme ekologis yang termasuk dalam biocolonization dimunculkan dalam novel. Tidak ada hal mencolok yang berbentuk modifikasi paten kuasa 'barat atas timur' yang spesifik misalnya. Namun demikian biokolonisasi atas alam dan 'pribumi' terjadi secara gradual dengan menarasikan versi *ruilslag* dengan dasar hukum yang jelas yang telah ditunggangi kepentingan individu, yaitu kapitalis, dalam novel ini direpresentasikan oleh pemodal dan kongsinya.

Ruilslag adalah terma yang secara etimologis berasal dari bahasa Belanda untuk mendefinisikan tukar-menukar aset dengan sepengetahuan pemerintah. Rambu-

rambu yang perlu diperhatikan banyak sekali. Tata Cara Pelaksanaan Tukar menukar barang milik negara nomor 2 Poin F sesuai yang dikeluarkan oleh Kemenkumham menyatakan bahwa

> Pemilihan Mitra berdasarkan tender Pemilihan Mitra untuk mencari penawaran terbaik yang tidak merugikan negara serta tidak menggunakan Kepres pengadaan barang dan jasa Pemerintah mengingat pembiayaan tukar menukar bukan dari APBN.

Pada satu sisi ruilslag, aspek legal formal yang *less-specific* dalam kaitannya dengan konservasi hutan, namun secara hukum dipandang mampu menjadi jalan keluar paling bijak bagi permasalahan sengketa lahan menjadi kontraproduktif bagi perjuangan para pegiat lingkungan. Terlepas dari prinsip bahwa lahan yang diruilslag harus kompetitif dan sebanding secara proporsional (luas wilayah) dan ekonomis secara pengembangan potensi. Namun demikian, dalam Lemah Tanjung dikatakan bahwa hal ini masih ditunggangi dengan indikasi korupsi yang mengatasnamakan pembangunan.

> Ketika di rumah, saya membaca kliping-kliping surat kabar tentang APP yang ditulis Sulastri. Salah satunya menyebutkan, tender Lemah Tanjung dimenangkan oleh PT Bangun Kerta, sekalipun ada developer lain yang menawar lebih mahal. Jadi, jelas di sini ada praktik korupsi. (Ibrahim, 2003:25)

Ruilslag yang dimenangkan oleh PT Bangun Kerta dianggap tidak fair oleh para pegiat lingkungan. Mereka menganggap bahwa manipulasi hukum telah terjadi. “Ruilslag areal APP menurut developer sudah sah. Apalagi mereka punya kekuasaan dan uang. Saya tak tahan untuk tidak mengatakan hal ini kepada Ibu In, apakah kita bukan semut di muka para gajah? Tanpa ragu ia menganggukkan kepala. “Tapi saya akan jalan terus!” tandasnya buru-buru (Ibrahim, 2003: 220). Mereka percaya bahwa dengan perjuangan dari bawah dengan menggalang kekuatan dari berbagai lini akan mampu mengetuk hati penguasa pusat yang memiliki legitimasi akan hukum.

> “Orang-orang itu bilang hanya penguasa yang bisa membatalkan ruislag. Kami sudah mengadukan masalah ini hingga ke DPR sana. Baik DPR maupun Sarwono, yang waktu itu Menteri Lingkungan Hidup, menganggap tanah yang penuh pohon langka ini harus tetap menjadi media pendidikan,” Saya melihat ada kemarahan ketika Ilham mengucapkan kata-kata itu. (Ibrahim, 2003: 6)

Terkait dengan usaha untuk mengkontestasi modifikasi paten yang 'baratsentris', Lemah Tanjung mencoba untuk memotret alasan yang berkaitan aspek historis dan nostalgia. Memori kolektif yang merupakan bahasan postcolonial yang mampu 'menyatukan' serpihan atau entitas dalam sebuah arus besar perjuangan dipotret dengan lugas.

> Mbah Pari, yang tanpa ditanya bercerita kepada kami, "pada tahun 1949, saya adalah tentara teladan dan mempertahankan tanah kita di Lemah Tanjung. Empat puluh dua teman saya gugur pada saat itu. Cuma saya satu-satunya yang masih hidup. Kalau saya tidak memperjuangkan pembatalan ruislag yang tidak adil ini, pasti saya digugat oleh teman-teman yang sudah gugur." (Ibrahim, 2003: 14)

Mbah Pari sebagai generasi senior merasa *Ruilslag* bukan jalan keluar bagi sengketa Lemah Tanjung. *Ruilslag* dianggap tidak dapat mengakomodasi aspek historis. Sejarah akan sebuah tempat tidak akan bisa dihapus dan digantikan bila tempat tersebut dipindah, atau beralih fungsi. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu In,

> Napas saya sudah tersengal ketika dia berkata seperti itu, padahal ruilslag sudah dimenangkan oleh PT Bangun Kerta. Dari perundingan itu, mereka akan mencarikan ganti tanah di Randu Agung. Saya katakan padanya, mereka tidak akan bisa menyuruh saya pindah dari tempat ini. Ada banyak tanaman langka dan berjenis-jenis burung. Suami saya tahu, sejak kecil saya bermimpi duduk-duduk di tengah kebun yang luas. Oleh karena itu, saya memilih bekerja di sini. (Ibrahim, 2003: 24)

Kutipan yang memuat kekhawatiran sekaligus semangat yang berapi-api dari Ibu In menyikapi *ruilslag* dan memperjuangkan penggagalannya juga muncul dalam benak Mbak Gita yang "takjub pada Bu Indri. Di era Orde Baru, ketika kekuasaan lebih benar dari hukum, dia bisa bersikukuh dengan kebenaran itu". (Ibrahim, 2003: 19)

> Rasanya saya akan kehilangan juga, kalau tempat saya melihat kunang-kunang itu akan dipakai untuk rumah-rumah mewah….., kelak Bonet akan melihat kunang-kunang itu sebagai bagian dari masa kecilnya. Saya kira bukan hanya Bonet saja, semua perantau yang berasal dari Malang, akan melihat tempat-tempat seperti itu sebagai monumen bersejarah dalam hidupnya. (Ibrahim, 2003: 17)

Keyakinan Ibu In yang belakangan diikuti oleh Mbak Gita menjadi nafas perjuangan menggagalkan ruilslag yang sangat diskriminatif terhadap alam yang merupakan subjek

> "Suatu kali saya berpikir untuk mengajak tokoh-tokoh masyarakat dalam masalah ruilslag ini. Karena setelah beberapa kali kirim surat ke beberapa instansi, tidak ada jawaban. Saya merasa mendapat kekuatan lagi ketika berkenalan dengan penyair muda, yang waktu itu, merespons dengan baik masalah Lemah Tanjung. Ia berjanji memudahkan kita untuk bertemu dengan para birokrat." Dalam pertemuan ini, mereka sepakat akan meminta DPRD mengubah isi Perda dan mereka juga setuju untuk mempublikasikan di media massa. (Ibrahim, 2003: 27)

Terlepas dari rambu-rambu yang telah dimodifikasi dalam tata cara *ruilslag*, yang menjadi dasar pemahaman biokolonisasi dalam novel ini adalah bahwa sistem, alat, pelaksanaan *ruilslag* harus mendapatkan lisensi dari 'barat', terma 'barat' dalam konteks novel ini adalah *the powerful* atau pemilik kuasa. Secara logis empiris mungkin saja bagi para pegiat lingkungan untuk melihat potensi hutan sebagai penyeimbang ekosistem dunia seperti pada kutipan berikut

> "sore ini, akan ke pakar lingkungan. Siapa tahu dia bisa memperkokoh dukungan masyarakat kepada kita. Dia seorang dosen dalam bidang biologi. Barisan kita pasti tambah kuat. Dia pakar lingkungan di tingkat nasional." Saya tersenyum dan bilang "Bu barisan kita punya nilai jual lho di media massa. Bayangkan barisan kita macam-macam kok, dari anak muda, aktivis kampus, orang tua, pensiunan, penyandang cacat, sampai pengangguran seperti saya. Ibu ingat nggak waktu kita ketemu orang-orang Deptan itu. Mereka barangkali tak menyangka melihat kita yang beraneka rupa." (Ibrahim, 2003: 375)

namun demikian bagi pemilik modal, hutan adalah wilayah yang perlu diberi sentuhan 'development' atau pembangunan, dan *ruilslag* menjadi ranah yang dapat dimanipulasi demi kepentingan pribadi.

3.3 Environmental Racism

Bahasan yang mengetengahkan environmental racism kental dinarasikan dalam Lemah Tanjung. Pandangan ekosentris yang diusung oleh Ibu In dan kelompok pegiat lingkungan yang beroposisi dengan antroposentris yang digawangi oleh pemodal atau developer membuat kelompok yang getol memperjuangkan ini

dianggap sebagai "object poverty, slavery, dehumanization and (potential) extinction (Huggan & Tiffin, 2010: 38) dalam konteks kekinian dianggap sebagai hal yang aneh dan menggelikan.

> Saya pernah baca di media massa lokal yang menulis, perjuangan Ibu In dan kawan-kawan dianggap menggelikan. Mereka menganggap tuntutan modernisasi cukup membuat lingkungan yang memadai di seputar rumah. Mereka menganggap perjuangan Bu In sebuah sinetron yang menggelikan" Saya melihat kegusaran di mata perempuan itu. Ia memotong bicara saya dan ujarnya, "Yang mengatakan begitu tentu seseorang yang cukup berpendidikan, bukan? Saya kira dia pernah ke mancanegara. Dia pasti tahu, bagaimana metropolitannya sebuah kota pasti ada hutan kotanya." (Ibrahim, 2003: 30)

Masih menyambung hal yang dibahas oleh Huggan dan Tiffin, tujuan eksploitasi alam adalah "minimizing non-human claims to (a shared) earth (Huggan & Tiffin, 2010:5). Yang dimaksud dengan nonhuman dalam konteks ini adalah warga sekitar dan para pegiat lingkungan. Fenomena yang identik dialami oleh suku Indian yang mati-matian mempertahankan tanahnya dari okupasi dan kolonisasi pendatang.

> Tiba-tiba Pak Tomo, yang biasanya pendiam di antara kami meneruskan omongan Mbah Pari,"Ya kita ini seperti suku Indian, yang terbelit masalah cuma bagaimana mempertahankan tanah"…"dan tidak pernah happy ending" sela Mbak Syarifah (Ibrahim, 2003: 95)

> Huggan & Tiffin menyatakan bahwa "Ecological disruption is co-extensive with damage to the social fabric, and that environment issues cannot be separated from questions of social justice and human rights" (2010:52) Dalam uraiannya Environmental Racism ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu "narrative of deprivation" dan genosida (2010:43).

Seperti yang dimaksud pada klasifikasi pertama proses melanggengkan kekuasaan atas wilayah sengketa dilakukan dengan berbagai macam teror yang intinya adalah meminggirkan dan mengecilkan usaha para pegiat lingkungan, memberi atribut antitesis bagi keamanan dan keseimbangan alam seperti penjarah misalnya.

> Katanya penggarap tanah di Lemah Tanjung diinterogasi polisi karena dianggap penjarah. Ibu In dianggap sebagai penggerak penjarahan itu…Kalau saya sudah biasa kena teror seperti itu. Yang membuat saya prihatin Pak Rudi (salah satu Dosen APP) kemarin juga diinterogasi dan di-*litsus* karena menunjukkan anti ruilslag (Ibrahim, 2003: 110)

Bahkan usaha teror yang dilancarkan oleh pemodal tidak hanya menyasar sisi personal dari pejuang lingkungan namun juga dengan memberi efek kejut visual atau *visual shock* dengan memasang demarkasi kemenangan seperti yang di dalam kutipan berikut dengan harapan pihak pegiat lingkungan 'sadar' bahwa perjuangan yang dilakukan sia-sia dan tidak ada celah dalam mengkontestasi penguasa,

> Karena setiap langkah dari dirinya, akan diperhitungkan dengan cermat oleh developer yang merasa dirugikan...Developer sudah memasang pagar-pagar seng sebagai tanda kemenangannya. Hampir semua masyarakat Malang sudah menganggap masalah itu tamat. Ibu In sudah belajar untuk menerima kekalahan itu, dan merasa perjuangannya itu adalah sejarah yang lewat (Ibrahim, 2003: 33)

Tak hanya berupa visualisasi namun para pemodal digambarkan telah memasuki ranah media massa dengan mengabarkan kuasanya atas sengketa perebutan tanah. Sehingga Mbak Gita berpendapat bahwa Inikah negeri tempat generasi sekarang harus dibesarkan. Di mana hukum dan kebenaran tidak bisa ditegakkan lantaran uang dan kekuasaan (Ibrahim, 2003: 369). Media massa lokal, dengan jangkauan lokal seakan menjadi instrumen yang cocok untuk meneguhkan dominasi kuasa pemodal.

> "Mbak sudah baca berita ini? Deptan sudah menganggap urusan *ruilslag* itu selesai. Sudah tidak ada lagi persoalan developer dan Deptan. Jadi, perjuangan yang Mbak-mbak ikut itu, mentah lagi," Katanya geram (Ibrahim, 2003: 368)

Agenda yang diperjuangkan oleh pegiat lingkungan tidak semerta-merta dimentahkan oleh pemberitaan media massa. Mbak Gita, bagian dari pegiat lingkungan itu menganggap bahwa perjuangan tidak sia-sia. Dengan skala lebih kecil ia berusaha memberikan pandangan ekosentris yang menjadi nadi perjuangannya.

> Saya ceritakan, saya sedang ikut berjuang untuk menciptakan hutan kota. Sekalipun, pada saat ini perjuangan itu dianggap kurang perlu karena ada seratus

> juta rakyat miskin. Tapi saya bilang kepada keponakan-keponakanku bahwa tidak semua orang harus mengurus ekonomi negeri ini. Bagaimanapun juga lingkungan yang hijau adalah atmosfer yang sangat diperlukan untuk kenyamanan hidup kita. Kehidupan ini tidak bisa hanya dinilai dengan uang saja (Ibrahim, 2003: 370)

Rupanya teror atas perjuangan yang dilakukan oleh para pegiat lingkungan, atau pribumi, atau pihak yang dikerdilkan dalam relasi kuasa atas tanah yang menjadi entitas keseimbangan ekosistem tak hanya sampai di situ. Kutipan berikut menjelaskan bahwa ada usaha terstruktur yang dilakukan dalam penafikan hak-hak sosial serta proses penghancuran perjuangan.

> …saya tidak ingat siapa yang menelepon tiba-tiba ada yang mengabarkan: kompleks APP terbakar! Hari-hari berikutnya, secara berturut-turut, surat kabar lokal memberitakan kejadian tersebut, disertai dengan foto-foto kami. Dalam sekejap, saya banyak menerima telepon dari orang-orang yang simpati dengan perjuangan kami, juga orang-orang yang mencurigai bahwa kebakaran itu rekayasa belaka. (Ibrahim, 2003: 382-384)

Teror terakhir, sebagai manifestasi klasifikasi *environmental racism* yang menandai keruntuhan besar perjuangan pegiat lingkungan atas tanah tempat hutan yang merupakan kawasan resapan air dan rumah bagi plasma nutfah adalah kebakaran (atau pembakaran) yang melenyapkan hampir seluruh isi hutan dan membuat "perempuan itu tersimpuh di halaman, terisak… di atas tanah yang dulunya begitu hijau. (Ibrahim, 2003: 385) Genosida atau pemusnahan entitas yang disengketakan menjadi titik klimaks perebutan ruang publik yang 'dimenangkan' oleh pemodal.

> Saya bayangkan, sambil mendorong kereta bayi, saya akan memperkenalkan kepada adik Bonet bahwa masih ada kunang-kunang di Lemah Tanjung. O, barangkali itu semua sekarang mustahil.(Ibrahim, 2003: 369) Kini rupanya yang akan saya tinggalkan adalah sebuah tanah di mana pohon langka tidak terawat lagi. Bisa jadi, di tanah itu nanti akan dibangun sebuah perumahan mewah bagi segelintir orang kaya. Kota Malang ini akan menjadi beton yang angkuh. (Ibrahim, 2003: 381)

4. PENUTUP

Kolonialisme dilegitimasi melalui penguasaan tanah. Pun diaplikasikan oleh pemodal dalam usaha mencapai tujuan demi melanggengkan kekuasaannya. Dengan berdalih pembangunan wilayah mereka merambah, memusnahkan vegetasi alam yang langka dan vital, serta menghilangkan kawasan resapan air, tanpa menghiraukan dampak yang menyeluruh terhadap masyarakat Kota Malang. Hal ini membuktikan bahwa tidak seperti beberapa warga sekitar yang bertahan di tengah terpaan teror ataupun para pegiat lingkungan yang menjunjung perspektif ekosentris dengan menghargai alam sebagai entitas yang berhak dipertahankan, perspektif antroposentris pemodal yang menitikberatkan pada keuntungan ekonomis manusia semata telah merusak ekosistem alam itu sendiri. *Postcolonial ecocriticism* memberikan ruang bagi pemahaman terintegrasi terhadap relasi kekuasaan yang menimbulkan efek yang substansial bagi keberlangsungan ekosistem, yang nantinya juga akan membawa manfaat yang sangat besar bagi kehidupan makhluk di bumi. Dengan demikian pembacaan kritis, ataupun penelitian atas sebuah karya dengan perspektif ini disarankan untuk dilanjutkan sehingga pemahaman pembaca akan fungsi dan perannya dalam lingkaran kekuasaan, bila dikaitkan dalam usaha penyelamatan ekosistem alam sebagai penyeimbang akan semakin tebal dengan harapan akan menumbuhkan kesadaran hidup yang berwawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Bonnie Roos & Alex Hunt. 2010. *Introduction: Narratives of Survival, Sustainability and Justice," in Postcolonial Green: Environmental Politics and World Narratives.* University of Virginia Press: Charlottesville

Huggan, Graham, & Helen Tiffin. 2010. *Postcolonial Ecocriticism: Literature, Animal, Environment*. NY: Routledge.

Erney, H. 2006. *Modernity and globalization in contemporary literature: A postcolonial-ecocritical approach*. Available from ProQuest Dissertations & Theses Full Text: The Humanities and Social Sciences Collection. http://search.proquest.com/docview/304945463?accountid=25704

Hartmann, Simone Birgitte. 2006. *Feminist and Postcolonial Perspectives on Ecocriticism* in

Catrin Gersdorf and Sylvia Mayer, Ed. 2006. *Nature in Literature and Cultural Studies*. NY: Rodopi

Ibrahim, Ratna Indraswari. 2003. *Lemah Tanjung*. Grasindo: Jakarta.

Iheka, C. N. 2015. *African literature and the environment: A study in postcolonial ecocriticism*. Available from ProQuest Dissertations & Theses Full Text: The Humanities and Social Sciences Collection. http://search.proquest.com/docview/1693992515?accountid=25704

Marzek, Robert P. 2007. An Ecological and Postcolonial Study of Literature.NY: Palgrave Macmillan.

Mukherjee, Upamanyu Pablo. 2010. Postcolonial Environments: Nature, Culture, and the Contemporary Indian Novels in English. NY: Palgrave Macmilan

Rosyidah, Usma. 2013 *Ecological Imperialism dalam novel anak bakumpai terakhir karya Yuni Nurmala*. Makalah disajikan dalam Seminar Internasional The 1st Literary Studies Conference. Universitas Sanata Dharma. 17-18 Oktober 2013

White, L. 2009. *Fictions of progress: The eco-politics of temporal constructions in colonial and postcolonial novels.* Available from ProQuest Dissertations & Theses Full Text: The Humanities and Social Sciences Collection. http://search.proquest.com/docview/305111906?accountid=25704

Prosedur Pelaksanaan Tukar Menukar (Ruilslag) Barang Milik Negara. http://www.kemenkumham.go.id/v2/informasi-publik/biro-perlengkapan/prosedur-pengelolaan-bmn/259-prosedur-penatausahaan-barang-persediaan-3#sthash.wsOsYeZ9.dpuf. (20 Januari 2016)